



PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUH PURI KAUH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa Desa Dauh Puri Kauh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Dauh Puri Kauh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
17. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
18. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
19. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
20. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 40);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DAUH PURI KAUH
Dan
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUH PURI KAUH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. .5.111.795.395,93,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 2.182.193.779,00,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.071.643.159,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 637.528.300,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 195.248.010,00,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 450.000.000,00,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 5.536.613.248,00,-
Surplus/Defisit	Rp. (424.817.852,07),-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.106.035.627,46,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 200.000.000,00,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 906.035.627,46,-
	=====
Silpa Tahun Berjalan	Rp. 481.217.775,39,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini

- Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021.
- Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- Lampiran III : Laporan Realisasi Kegiatan
- Lampiran IV : Program Sektoral Yang Masuk Ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 29 Januari 2022



Diundangkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 29 Januari 2022



LEMBARAN DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021 NOMOR 42

Lampiran I : PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH
Tanggal : 29 Januari 2022
Nomor : 01 Tahun 2022
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA DAUH PURI KAUH KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		5.095.510.399,00	5.090.372.731,00	5.137.668,00
Dana Desa		1.283.748.000,00	1.283.748.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		1.535.127.100,00	1.535.127.100,00	0,00
Alokasi Dana Desa		2.182.135.299,00	2.176.997.631,00	5.137.668,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		94.500.000,00	94.500.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		39.600.000,00	21.422.664,93	18.177.335,07
JUMLAH PENDAPATAN		5.135.110.399,00	5.111.795.395,93	23.315.003,07
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		2.376.712.854,01	2.182.193.779,00	194.519.075,01
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		2.270.507.732,84	2.071.643.159,00	198.864.573,84
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		720.387.431,77	637.528.300,00	82.859.131,77
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		221.633.091,00	195.248.010,00	26.385.081,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		451.904.916,84	450.000.000,00	1.904.916,84
JUMLAH BELANJA		6.041.146.026,46	5.536.613.248,00	504.532.778,46
SURPLUS / (DEFISIT)		(906.035.627,46)	(424.817.852,07)	(481.217.775,39)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		1.106.035.627,46	1.106.035.627,46	0,00
Peneluaran Pembiayaan		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		906.035.627,46	906.035.627,46	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	481.217.775,39	(481.217.775,39)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Denpasar, 31 Desember 2021

Perbekel Desa Dauh Puri Kauh,



DRS. I GUSTI MADE SUANDHI

Lampiran II : PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH
Tanggal : 29 Januari 2022
Nomor : 01 Tahun 2022
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun
Anggaran 2021

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA DAUH PURI KAUH
TAHUN ANGGARAN 2021

A. Informasi Umum.

Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh merupakan Desa di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 157 Tahun 1982, tanggal 01 Juni 1982, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Dauh Puri Kauh sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	DRS. I GUSTI MADE SUANDHI	PERBEKEL
2	A.A BAGUS MAHENDRAYANA,SE	SEKRETARIS
3	SRI APRINGGAWATI	KASI PEMERINTAHAN
4	I WAYAN SUKANTA	KASI KESEJAHTERAAN
5	DRA. LUH PUTU SUKASIH	KASI PELAYANAN
6	NI MADE NURMAYANTHI, SE	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
7	I WAYAN CIKA	KAUR KEUANGAN / BENDAHARA DESA
8	PUTU ASRIANI DELIA, S.Pd	KAUR PERENCANAAN
9	I MADE AGUS SUYADNYA	PELAKSANA KEWILAYAHAN JEMATANG
10	I WAYAN EKA PUTRA,SE	PELAKSANA KEWILAYAHAN PENGIASAN

11	NI WAYAN SUMARTINI	PELAKSANA KEWILAYAHAN BERABAN
12	I WAYAN JUWENA	PELAKSANA KEWILAYAHAN SUMUH
13	I GEDE WAYAN ADI NATALIANA	PELAKSANA KEWILAYAHAN BUMI WERDHI
14	I KETUT SUKABERATA,S.SOS	PELAKSANA KEWILAYAHAN ABIANTEGAL
15	I MADE SUTAWAN	PELAKSANA KEWILAYAHAN SEBELANGA

Kantor Desa Dauh Puri Kauh beralamat di Jalan Teuku Umar No. 132 Denpasar.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan, Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas.

SILPA tahun anggaran 2020		Rp. 1.106.035.627,46
Saldo awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp. 0	
Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp. 274.901.802,00	
Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp. 274.901.802,00	
Saldo akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara		Rp. 0
Saldo Kas per 31 Desember 2021		Rp. 481.217.775,39

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli Desa terdiri dari :

Rincian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/kurang (Rp.)
Hasil Usaha	0	0	0
Hasil Asset	0	0	0
Swadaya, partisipasi dan gotong royong	0	0	0
Lain –lain PADesa yang sah	0	0	0
Total	0	0	0

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tahapan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / kurang (Rp)
Tahap I	770.248.800,00	770.248.800,00	0
Tahap II	513.499.200,00	513.499.200,00	0
Total	1.283.748.000,00	1.283.748.000,00	0

4. Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Tahapan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Tahap I	792.998.750,00	792.998.750,00	0
Tahap II	742.128.350,00	742.128.350,00	0
Total	1.535.127.100,00	1.535.127.100,00	0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

Tahapan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Tahap I	898.154.238,80	895.585.404,80	2.568.834,00
Tahap II	872.854.119,60	870.285.285,60	2.568.834,00
Tahap III	411.126.940,60	411.126.940,60	0
Total	2.182.135.299,00	2.176.997.631,00	5.137.668,00 *

Terdapat kekurangan pendapatan di Rekening Kas Desa senilai Rp. 5.137.668,00,- untuk pembayaran BPJS yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, dimana kekurangan tersebut merupakan pembayaran 1% atas kewajiban iuran BPJS Kesehatan Perbekel dan Perangkat Desa.

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Bali adalah sebagai berikut :

Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Total	0	0	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
BKK Pelestarian Adat dan Budaya	94.500.000	94.500.000	0
Total	94.500.000	94.500.000	0

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0	0	0
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0	0
Penerimaan dari Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	0
Koreksi kesalahan belanja tahunan anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa	0	0	0
Bunga Bank	39.600.000,00	21.422.664,93	18.177.335,07
Lain-lain pendapatan yang sah Desa	0	4.250.000,00	-4.250.000,00
Total	39.600.000,00	25.672.664,93	13.927.335,07

Lain-lain Pendapatan yang Sah Desa adalah hadiah lomba Juara 3 Desa Aman Covid19, hadiah lomba ini tidak masuk dalam pembukuan Siskeudes karena tidak masuk dalam RKP Desa Tahun 2021 serta tidak dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021, maka terjadi selisih pada Laporan Buku Bank dan Buku Kas Umum (BKU) siskeudes dengan saldo rekening kas Desa di Bank BPD Bali Sebesar Rp. 4.250.000.

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Belanja Pegawai	1.350.854.400,00	1.345.513.576,00	5.340.824,00
Belanja Barang dan Jasa	1.017.858.454,01	829.040.203,00	188.818.251,01
Belanja Modal	8.000.000,00	7.640.000,00	360.000,00
Total	2.376.712.854,01	2.182.193.779,00	194.519.075,01

10. Belanja Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	926.838.353,84	865.996.674,00	60.841.679,84
Belanja Modal	1.343.669.379,00	1.205.646.485,00	138.022.894,00
Total	2.270.507.732,84	2.071.643.159,00	198.864.573,84

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	720.387.431,77	637.528.300,00	82.859.131,77
Belanja Modal	0	0	0
Total	720.387.431,77	637.528.300,00	82.859.131,77

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	178.271.186,00	152.389.050,00	25.882.136,00
Belanja Modal	43.361.905,00	42.858.960,00	502.945,00
Total	221.633.091,00	195.248.010,00	26.385.081,00

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2020, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagai berikut :

Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Belanja Tak Terduga	451.904.916,84	450.000.000,00	1.904.916,84
Total	451.904.916,84	450.000.000,00	1.904.916,84

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klarifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	151.920.000,00	151.920.000,00	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	813.742.332,00	813.742.332,00	0
Jaminan Sosial Perbekel dan Perangkat Desa	33.592.068,00	28.251.244,00	5.340.824,00
Tunjangan BPD	351.600.000,00	351.600.000,00	0
Total	1.350.854.400,00	1.345.513.576,00	5.340.824,00
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	698.270.443,61	550.591.748,00	147.678.695,61
Belanja Jasa honorarium	1.290.080.400,00	1.229.792.400,00	60.288.000,00
Belanja Operasional Aparatur Desa	0	0	0
Belanja Jasa Sewa	219.288.400,00	197.190.800,00	22.097.600,00
Belanja Operasional Perkantoran	49.560.000,00	35.787.567,00	13.772.433,00
Belanja Pemeliharaan	158.053.275,00	125.781.212,00	32.272.063,00

Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	428.102.907,01	345.810.500,00	82.292.407,01
Total	2.843.355.425,62	2.484.954.227,00	358.401.198,62
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	8.000.000,00	7.640.000,00	360.000,00
Belanja Modal Kendaraan	455.000.000,00	448.000.000,00	7.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.447.400,00	40.220.700,00	226.700,00
Belanja Modal Jalan	543.266.655,00	455.503.160,00	87.763.495,00
Belanja Modal Jembatan	0	0	0
Belanja Modal irigasi/ Embung/air Sungai/Draenase	304.955.324,00	261.922.625,00	43.032.699,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	43.361.905,00	42.858.960,00	502.945,00
Total	1.395.031.284,00	1.256.145.445,00	138.885.839,00

15. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.003.281.307,01	1.865.052.943,00	138.228.364,01

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	165.941.000,00	143.114.486,00	22.826.514,00
Sub Bidang administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	108.638.899,00	100.677.900,00	7.960.999,00
Sub Bidang Tat Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	98.851.648,00	73.348.450,00	25.503.198,00
Sub Bidang Pertanahan	0	0	0
Total	2.376.712.854,01	2.182.193.779,00	194.519.075,01
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	4.800.000	4.800.000	0
Sub Bidang Kesehatan	552.832.618,84	517.401.148,00	35.431.470,84
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	763.957.679,00	650.010.110,00	113.947.569,00
Sub Bidang Kawasan Permukiman	22.145.000,00	22.142.475,00	2.525,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	919.172.435,00	870.689.426,00	48.483.009,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.600.000	6.600.000,00	1.000.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0
Sub Bidang Pariwisata	0	0	0
Total	2.270.507.732,84	2.071.643.159,00	198.864.573,84

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	223.906.644,47	219.986.650,00	3.919.794,47
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	377.294.850,00	314.093.400,00	63.201.405,00
Sub Bidang Kepemudaaan dan Olah Raga	24.500.000,00	24.500.000,00	0
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	94.685.937,30	78.948.050,00	15.737.887,30
Total	720.387.431,77	637.528.300,00	82.859.131,77
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	0
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	146.154.905,00	133.447.460,00	12.707.445,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.339.886,00	5.519.050,00	3.820.836,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Keluarga	37.968.000,00	29.549.000,00	8.419.000,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	24.401.300,00	24.197.500,00	203.800,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.769.000,00	2.535.000,00	1.234.000,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0
Total	221.633.091,00	195.248.010,00	26.385.081,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.904.916,84	0	1.904.916,84
Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0	0
Sub Bidang Keadaan Mendesak	450.000.000,00	450.000.000,00	0
Total	451.904.916,84	450.000.000,00	1.904.916,84

16. Pembiayaan

Jumlah Netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	1.106.035.627,46	1.106.035.627,46	0
Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0
Total	906.035.627,46	906.035.627,46	0
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	1.106.035.627,46	1.106.035.627,46	0
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0
Total	1.106.035.627,46	1.106.035.627,46	0
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
Penyertaan Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0
Total	200.000.000,00	200.000.000,00	0

17. Asset Desa

Perolehan Asset Desa adalah sebagai berikut :

Rincian	2020	2021	Total Perolehan Asset
Tanah	0	0	0
Peralatan, Mesin dan Alat Berat	352.114.325,00	7.640.000,00	359.754.325,00
Kendaraan	63.950.000	448.000.000,00	511.950.000,00
Gedung dan Bangunan	2.684.681.378,58	0	2.684.681.378,58
Jalan	2.324.472.482,30	455.503.160,00	2.779.975.642,30
Jembatan	0	0	0
Draenase	1.098.296.845,56	261.922.625,00	1.360.219.470,56
Jaringan Instalasi /	0	0	0
Asset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa adalah sebagai berikut :

2020	2021	Penambahan/Pengurangan
0	200.000.000,00	200.000.000,00

Denpasar, 29 Januari 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

 IGUSTI MADE SUANDHI

Lampiran III : PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH
 Tanggal : 29 Januari 2022
 Nomor : 01 Tahun 2022
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun
 Anggaran 2021

LAPORAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	REALISASI		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
A	B	C	D	E	F
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	12 OB	√		
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	168 OB	√		
3	BPJS Kesehatan bagi Perbekel dan Perangkat Desa	180 OB	√		
4	BPJS Ketenaga Kerjaan bagi Perbekel dan Perangkat Desa	180 OB	√		
5	Alat-alat Tulis Kantor (ATK)	12 Bulan	√		
6	Pengadaan Seragam Perbekel dan Perangkat Desa	2 Bulan	√		
7	Honor PKPKD dan PPKD	12 Bulan	√		
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Rekening Listrik, PDAM, DSDP, Internet dan Majalah)	12 Bulan	√		
9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Kegiatan Sosial Desa)	12 Bulan	√		
10	Tunjangan BPD	12 Bulan	√		
11	Penyediaan Operasional BPD	12 Bulan	√		

12	Penyediaan Penghasilan Staf Desa, Loper, Cleaning Servis, Tenaga Ahli Desa	12 Bulan	√		
13	Administrasi Bank	12 Bulan	√		
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	12 Bulan	√		
15	Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen	12 Bulan	√		
16	Pendataan SDGS	12 Bulan	√		
17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	12 Bulan	√		
18	Musyawarah Desa Bulan Juni	1 Hari	√		
19	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusRenBangDes)	1 Hari	√		
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes)	3 Bulan	√		
21	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ APBDes)	4 Bulan	√		
22	Penyusunan Laporan Perbekel (LPPD, LKPI, Laporan akhir Tahun)	2 Bulan	√		

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

23	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	12 Bulan	√		
24	Penyelenggaraan Posyandu	12 Bulan	√		
25	Penyuluhan Narkoba	12 Bulan	√		
26	Pengawasan Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Desa	12 Bulan	√		

27	Gertak PSN dan Penyuluhan Gema Petik	12 Bulan	√		
28	Konvergensi Pencegahan Stunting dan Rumah Desa Sehat	12 Bulan	√		
29	Pelaksanaan Pemulihan Penanganan Pandemi Covid-19	12 Bulan	√		
30	Pemavingan Jl. Nusa Kambangan Anak Gang XIV Br. Jematang	245 M2	√		
31	Pemavingan Jl. Pulau Misol Gg XIV Br. Sumuh	698.70 M2	√		
32	Pemavingan Jl. Pulau Batanta Gg II B Barat Br. Abiantegal	881 M2	√		
33	Pemavingan Jl. Pulau Misol Gg II Br. Beraban dan Br. Sumuh	255.10 M2	√		
34	Pengerjaan Got Tertutup Jl. P. Misol Gg II Br. Beraban dan Br. Sumuh	12.30 M3	√		
35	Pengerjaan Got Tertutup Jl. P. Misol Gg X Br. Sumuh	450.15 M2	√		
36	Penggelontoran Got Jl. Pulau Pinang Gg IV Br. Abiantegal	1 paket	√		
37	Bale Pesantian Pura Penataran Sumuh	720.60 M2	√		
38	Pengadaan Gapura Gang/ Papan Nama Gang Di Sumuh	1 Paket	√		
39	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Pengadaan Sumur Bor dan Tower Penampungan Air di Pura Gaduh Br. Pengiasan)	1 Paket	√		
40	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan	12 Bulan	√		
41	Pengelolaan Sampah	1 Paket	√		
42	Penataan Sungai Beling Br. Sebelanga	750 M2	√		

43	Pembuatan Tembok Penahan Banjir Jl. Nusa Kambangan Gg Dahlia Br. Jematang	450.15 M2	√		
44	Pembuatan Baliho Penetapan APBDes	8 buah	√		

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

45	Patroli Satlinmas dan Patroli Dialogis	12 Bulan	√		
46	Penyuluhan Sadar Hukum	1 Hari	√		
47	Pembinaan Grup Rebana	7 Hari	√		
48	Bulan Bung Karno	1 Bulan	√		
49	Perayaan Hari Piodalan dan Upacara Keagamaan	12 Bulan	√		
50	Perayaan HUT Proklamasi RI	1 Hari	√		
51	Banten Pecaruan Sasih	1 Hari	√		
52	Pembinaan Keterampila Membuat Banten Ngaben	1 Bulan	√		
53	Bulan Bahasa Bali	1 Bulan	√		
54	Pelestarian Adat dan Budaya	1 Bulan	√		
55	Ekonomi Kreatif	1 Bulan	√		
56	Kegiatan 10 Program Pokok PKK dan Pembinaan Administrasi Pokja PKK	1 Bulan	√		
57	Pembinaan PKK Desa	1 Bulan	√		

58	Pembinaan Si Cantik PKK	1 Bulan	√		
59	Pembinaan Sekaa Gong PKK Br. Sebelanga	4 Bulan	√		
60	Pembinaan Karang Taruna	1 Bulan	√		

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

61	Pelatihan Ketahanan Pangan	3 Hari	√		
62	Pengelolaan Tanaman TOGA	7 Hari	√		
63	PKT Ketahanan Pangan	8 Bulan	√		
64	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa	1 Minggu	√		
65	Pelatihan Tim Verifikasi dan Tim RKP	3 Hari	√		
66	Pelatihan Tata Rias	5 Hari	√		
67	Sosialisasi dan Deklarasi Desa Layak Anak	3 Hari	√		
68	Pelatihan Pembuatan Gayor	5 Hari	√		
69	Pelatihan Pengurus BUMDes	2 Hari	√		

V. Bidang Tak Terduga

70	Penanggulangan Bencana Alam	12 Bulan		√	Belum ada SK walikota tentang keadaan darurat Desa
71	BLT - DD	12 Bulan	√		

Denpasar, 29 Januari 2022



Lampiran IV : PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH
Tanggal : 29 Januari 2022
Nomor : 01 Tahun 2022
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun
Anggaran 2021

PROGRAM SEKTORAL YANG MASUK KE DESA

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp.)
NIHIL							

Denpasar, 29 Januari 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

GUSNI MADE SUANDHI